

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tantangan dalam pembangunan di Indonesia adalah mengatasi ketimpangan. Ketimpangan merupakan hal umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan kondisi pada masing-masing wilayah. Ketimpangan wilayah adalah kondisi kesenjangan atau ketidakmerataan di suatu wilayah, sehingga menimbulkan selisih antar wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pesisir Pulau Sumatera, terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota yang masih terus melakukan upaya pembangunan. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Data dari BPS Provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2018-2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Selain itu data pendapatan perkapita menunjukkan adanya selisih yang cukup jauh antara wilayah dengan pendapatan perkapita tertinggi yaitu Kota Padang Panjang dengan perkapita terendah bahkan di Kabupaten Pesisir Selatan, dan masih banyak kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Ketika dua hal terpenting dalam pembangunan yaitu pertumbuhan dan pemerataan belum tercapai, maka akan timbul suatu ketimpangan (Sirojuzilam, 2005).

Ketimpangan menyebabkan pembangunan yang tidak merata, jika dibiarkan akan menghambat daerah didalamnya untuk berkembang. Hal tersebut menjadi alasan kuat untuk mengkaji ketimpangan wilayah. Dalam penelitian ini, sebelum mengkaji ketimpangan wilayah yang ada, akan dilihat terlebih dahulu bagaimana kondisi perekonomian dari tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebab kondisi yang terjadi di Provinsi secara keseluruhan tidak terlepas dari wilayah-wilayah yang ada di dalamnya. Dari teridentifikasinya kondisi ekonomi yang ada, kemudian barulah dikaji mengenai ketimpangannya.

Ketimpangan yang terjadi jika dibiarkan akan semakin melebar dan akan semakin parah, hingga menghambat pembangunan di suatu wilayah. Dengan alasan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Kajian Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi perekonomian dan ketimpangan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi dan ketimpangan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dari tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menghitung kontribusi sektor
- b. Mengidentifikasi klasifikasi wilayah
- c. Menganalisis ketimpangan ekonomi

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas ketimpangan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dari aspek ekonomi. Diawali dengan mengidentifikasi kondisi ekonomi dari kontribusi sektor dan klasifikasi wilayah dari tipologi klassen. Kemudian ketimpangan provinsi dihitung dengan Indeks Williamson dan ketimpangan kabupaten kota melalui selisih pendapatan perkapita. Penelitian ini mengamati perubahan dalam jangka panjang yaitu 10 tahun yang dipisah menjadi 4 titik tahun yaitu 2011, 2015, 2019 dan 2020. Hal ini karena pada tahun 2020 terlihat adanya perubahan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

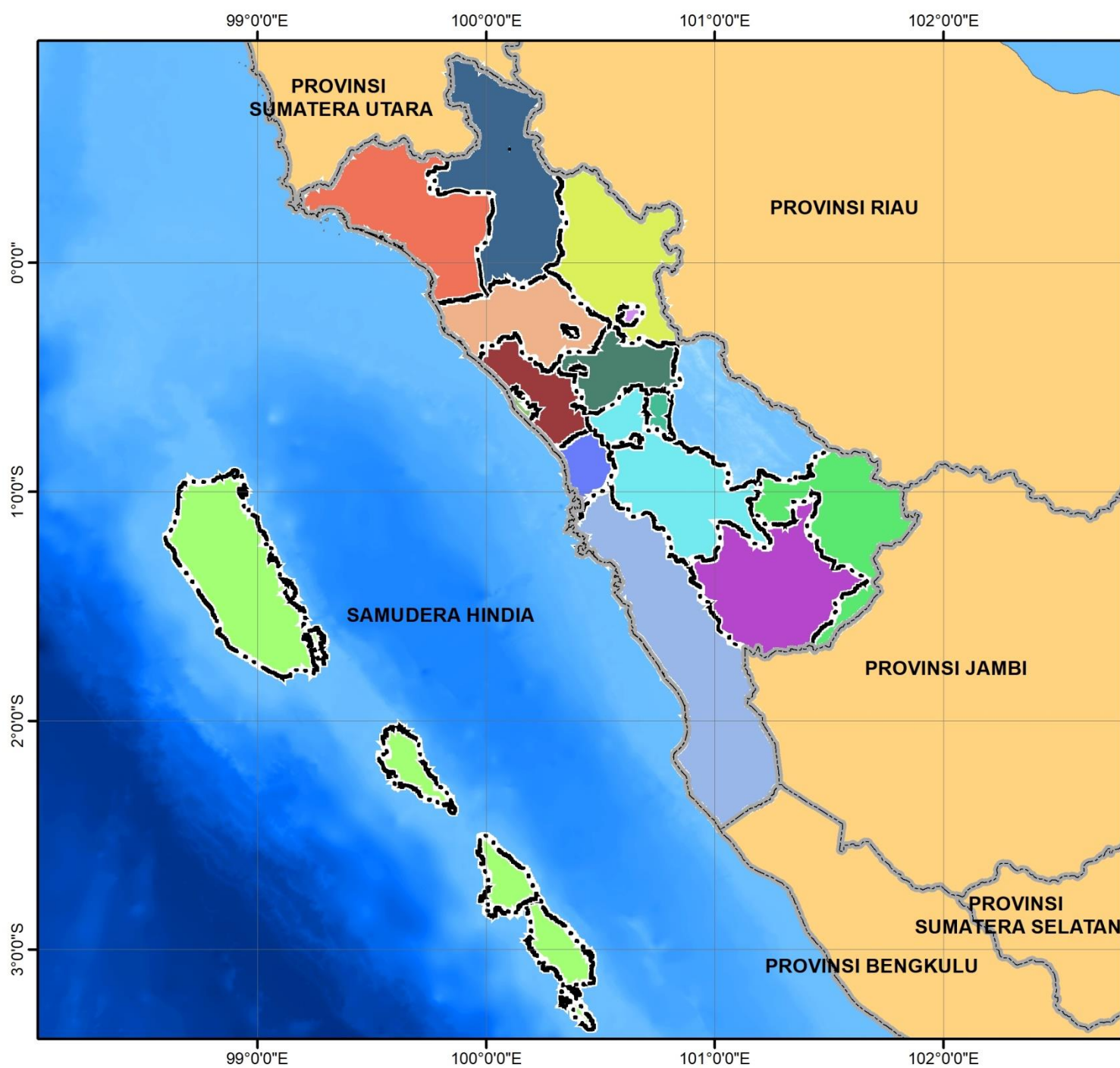
1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian dilakukan dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat, dengan total luas wilayah 4.201.289 ha yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.498.751 jiwa. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas administrasi wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau
Sebelah Selatan	: Provinsi Bengkulu
Sebelah Timur	: Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu
Sebelah Barat	: Samudera Hindia

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat berikut ini.



TUGAS AKHIR

Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat

1:2.500.000

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kab./Kota

Perairan

- Laut

Kabupaten/Kota

 Kab. Agam	 Kab. Solok Selatan
 Kab. Dharmasraya	 Kab. Tanah Datar
 Kab. Kep. Mentawai	 Kota Bukittinggi
 Kab. Limapuluh Kota	 Kota Padang
 Kab. Padang Pariaman	 Kota Padang Panjang
 Kab. Pasaman	 Kota Pariaman
 Kab. Pasaman Barat	 Kota Payakumbuh
 Kab. Pesisir Selatan	 Kota Sawahlunto
 Kab. Sawahlunto/Sijunjung	 Kota Solok
 Kab. Solok	

Dibuat Oleh:
MARDHOTILLAH ASTRI
1510015311017

Pembimbing 1: Ir. Hamdi Nur, M.T
Pembimbing 2: Wenny Widya Wahyudi, SP, M.Si

Peta Inset

Sumber:
Peta Rupa Bumi Indonesia 1:2.500.000

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pada penelitian adalah kontribusi sektor di kabupaten dan kota, Tipologi Klassen di kabupaten dan kota, Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Barat, dan selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara sebagai berikut.

1) Survey Instansi

Penulis melakukan survey ke instansi yang menyediakan data yang dibutuhkan terkait penelitian yang bersumber dari :

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, berupa data PDRB Kabupaten dan Kota Harga Konstan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan jumlah penduduk dari publikasi Provinsi Dalam Angka dan Kabupaten Kota Dalam Angka Tahun 2011-2020
- BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, berupa Data RTRW Peta Administrasi Provinsi

2) *Library Reasearch*

Penulis melakukan pengumpulan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, bersumber dari buku, jurnal penelitian atau artikel ilmiah, data dari internet dan lain-lain.

1.6.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Alasan Pemilihan Variabel
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan atau peningkatan nilai tambah kegiatan ekonomi di suatu daerah, dilihat dari PDRB Harga Konstan	Variabel dipilih karena merupakan indikator pembangunan, untuk melihat kondisi ekonomi wilayah
Pendapatan Perkapita	PDRB perkapita adalah pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	Variabel dipilih karena merupakan indikator pembangunan mengukur rata-rata pendapatan yang diterima penduduk di wilayah studi, dan merupakan salah satu indikator dalam perhitungan ketimpangan wilayah
Kontribusi Sektor	Peran pendapatan sektor terhadap pendapatan wilayah	Variabel dipilih untuk mengetahui kondisi ekonomi wilayah

Sumber : Analisis dari Studi Literatur dan Penelitian Terdahulu

1.6.3 Metode Analisa Data

Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif, dimana metode kuantitatif digunakan untuk perhitungan statistik sederhana dan rumus yang digunakan dalam tahap analisis, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan dari analisis dalam kalimat, tabel maupun gambar sehingga mudah untuk dipahami. Berikut merupakan tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian.

1.6.3.1 Identifikasi Kondisi Ekonomi Kabupaten Kota

Identifikasi kondisi ekonomi digunakan untuk mengetahui kontribusi sektor dan klasifikasi kabupaten kota. Berikut uraian metode yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini.

a. Kontribusi Sektor

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor mana yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian kabupaten dan kota. Tahap yang dilakukan untuk mengetahui kontribusi sektor adalah menghitung kontribusi dari 17 lapangan usaha penyusun PDRB per tahun terlebih dahulu, menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi sektor} = \frac{\text{PDRB lapangan usaha } i \text{ di kab/kota}}{\text{PDRB kab/kota}} \times 100$$

Setelah diketahui kontribusi dari 17 lapangan usaha, maka kelompokkan menjadi 3 kelompok sektor berdasarkan jenisnya yaitu : Primer, Sekunder, dan Tersier dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2
Rincian Pembagian Jenis Sektor

No	Sektor	Lapangan Usaha
1	Primer	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
		B. Pertambangan dan Penggalian
2	Sekunder	C. Industri Pengolahan
		F. Konstruksi
		D. Pengadaan Listrik dan Gas
		E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3	Tersier	H. Transportasi dan Pergudangan
		I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		J. Informasi dan Komunikasi
		G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		K. Jasa Keuangan dan Asuransi
		L. Real Estate
		M, N Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		

No	Sektor	Lapangan Usaha
		P. Jasa Pendidikan
		Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
		R,S,T,U Jasa Lainnya

Sumber : Analisis Studi Literatur Tahun 2021

b. Tipologi Klassen

Untuk mengetahui klasifikasi wilayah digunakan metode analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi kelas dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita kabupaten kota dibandingkan dengan provinsi, dari nilai tersebut diketahui kabupaten kota menempati kuadran berapa dalam klasifikasi wilayah. Berikut merupakan matriks tipologi kelas.

Tabel 1.3
Matriks Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
ri > r	Kuadran I Wilayah maju dan cepat tumbuh (High Grow and High Income)	Kuadran III Wilayah berkembang cepat (High grow but low income)
ri < r	Kuadran II Wilayah maju tapi tertekan (Low growth but high income)	Kuadran IV Wilayah relative tertinggal (low growth and low income)

Sumber : Studi Literatur Tahun 2021

Keterangan :

Ri = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

R = Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Yi = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota

Y = PDRB Perkapita Provinsi

1.6.3.2 Analisis Ketimpangan Ekonomi

Analisis ini diawali dengan menghitung nilai ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat dengan Indeks Williamson sehingga diketahui nilai ketimpangan tahun 2011-2020, selanjutnya untuk mengetahui ketimpangan antar kabupaten kota dilihat melalui nilai selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap provinsi.

a. Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan di provinsi diukur dengan menggunakan Indeks Williamson (IW), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Williamson} = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

Y_i = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Y = PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

n = Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat

Dalam penelitian ini menghitung ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2020, sehingga diketahui perkembangan dan kategori dari ketimpangan tersebut. Berikut merupakan kriteria Indeks Williamson.

Tabel 1.4
Kriteria Ketimpangan Indeks Williamson

Nilai Indeks Williamson	Kriteria
0,1 – 0,35	Ketimpangan rendah
0,35 – 0,50	Ketimpangan sedang
>0,5	Ketimpangan tinggi

Sumber : Studi Literatur Tahun 2021

b. Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten Kota Terhadap Provinsi

Setelah diketahui ketimpangan di provinsi maka langkah selanjutnya mencari ketimpangan antar kabupaten kota dengan melihat selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap dengan provinsi, sehingga diketahui wilayah mana yang paling timpang dan wilayah mana yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan di provinsi. berikut merupakan cara mencari selisih pendapatan perkpaita kabupaten kota dengan provinsi.

$$\text{Selisih Pendapatan Perkapita} = Y_i - Y$$

Keterangan :

Y_i = Pendapatan Perkapita kabupaten/kota

Y = Pendapatan Perkapita provinsi

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, batasan penelitian, metode penelitian ruang lingkup materi dan wilayah, sistematika penulisan dan keluaran.

BAB II STUDI LITERATUR

Bab ini berisi tentang literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi dasar dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang kondisi eksisting wilayah studi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi wilayah berdasarkan pola dan struktur ekonomi, kemudian untuk melihat ketimpangan ekonomi wilayah yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang temuan yang disimpulkan dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan rekomendasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

1.8 Keluaran

Keluaran pada penelitian ini adalah untuk mengetahui ketimpangan antar kabupaten kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka berpikir penelitian di bawah ini.

Gambar 1.2
Kerangka Berpikir

